

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bukti keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder (Defitri, 2014), untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah (Defitri, Yulistia, Apriyeni, & Eliza, 2016).

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan, implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum

bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern serta pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas. (Defitri, 2018)

Pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik (Megawati, 2015). Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019 mendapat pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Untuk hasil pemeriksaan LKPD dari Tahun Anggaran 2016-2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (liputanbali,2019). Menurut kepala BPK RI Perwakilan Bali,mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan LKPD Kabupaten Tabanan Tahun Anggan 2020 perlu ditingkatkan kembali, sehingga kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan bisa lebih baik (baliportalnews, 2021).

Menurut Megawati (2015) salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengelolaan keuangan, dimana keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengelolaan keuangan perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi agar penatausahaan keuangan memiliki akurasi dan

akuntabilitas yang tinggi. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaan dana (Defitri,2018).

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula (Megawati, 2015). Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10) dalam Nagor (2015), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

Dalam lingkup pemerintahan, keuangan daerah dikelola berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, tertib, ekonomis dan transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas berkeadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk publik, yang dimaksud dengan tertib yaitu dimana pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Subetti, 2020)

Variabel Pengelolaan keuangan pada penelitian Jusuf (2013), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Ertambang (2017), menunjukan hasil

yang berbeda bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal. Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: 1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan Laporan Keuangan, 3. Pengamanan aset negara, 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurillah (2014) Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (Kiranayanti dan Erawati, 2016).

Dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu: 1. Pengendalian Lingkungan, 2. Penilaian Resiko, 3. Kegiatan Pengendalian, 4. Informasi dan Komunikasi, 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Tabel 1.1
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Permasalahan Utama	Jumlah Permasalahan
1.	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	46
2.	SOP belum disusun/ tidak lengkap	26
3.	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	13
4.	Lain-lain kelemahan SPI	33
Jumlah		118

(sumber www.bpk.go.id - IHPS II Tahun 2019)

Menurut Randal dan Alvin dalam Faisol (2016) Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Lingkungan pengendalian internal juga dapat membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga aset; menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Variabel Sistem Pengendalian Internal pada penelitian Kiranayanti (2016) dan Nurila (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian

Mokoginta (2017), menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mahmudi dalam Botutihe (2013:4) untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dihasilkan, maka kita perlu mengetahui siklus akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, lebih bervariasi, dan akan lebih berkualitas,

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Menurut Bastian dalam Botutihe (2013:4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem

akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Pemerintah daerah perlu mengambil pendekatan yang menempatkan sistem seperti di garis depan, dan mempertimbangkan baik sistem dan faktor terkait manusia sambil mengelola sistem informasi akuntansi. Pemda harus fokus pada

faktor-faktor kritis jika akan mencapai informasi akuntansi berkualitas tinggi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan (Huang, et al., 1999; Clikeman 1999 dalam Ratifah, 2014).

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah pada penelitian Pravasanti (2019), menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Yanti (2020), menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan, selain diperlukan pengelolaan keuangan, penerapan sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal yang baik dalam menyusun laporan keuangan diperlukan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahyuni dalam Erawati, 2018).

Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni dalam Erawati, 2018). Menurut Wahyudi dalam Erawati (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer dalam Nurillah, 2014) jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi

sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. (Nurilah,2014) Menurut Afiah dan Nuryanto pada Mene (2018) pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.

Pemanfaatan TI dalam akuntansi Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Haza (2015), teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula menjadi perhatian : 1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas 2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja 3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi 5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi 7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur 8. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Menurut Utama (2017) Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Variabel pemanfaatan

teknologi informasi pada penelitian Mamahit (2017), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Arif (2017), menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pemerintah Kabupaten Tabanan?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapat pada bangku perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Bagi universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu akuntansi dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan/lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar mampu meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memecahkan masalah yang ada di lapangan guna meningkatkan profitabilitas Pemerintah Kabupaten Tabanan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency Theory* Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan
2. pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan.

Menurut Firistina dalam Nurilah (2018) dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara

langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut Pujanira (2017) laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Baridwan dalam Pravasanti (2019) mendefinisikan Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Kualitas laporan keuangan merupakan tolok ukur baik atau tidaknya atas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki kualitas baik dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai LKPD.

Menurut Mokoginta (2017) laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuaikan dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Akhmad, 2017).

2.1.3 Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian pengelolaan sebagai 1. Proses, Cara, Perbuatan mengelola, 2. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan 4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”. Saat ini untuk pelaporan pertanggung jawaban keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah telah menggunakan suatu sistem. Peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah telah sedikit membawa perubahan dalam akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintahan pusat maupun daerah saat ini telah melakukan perubahan tata pembukuan dari sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya (Widayanti, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

piñatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Lamusu dalam Faishol, 2016)

Herawati dalam (Defitri, 2018) menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik. Implementasi pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pegawai yang terlibat akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Ovita & Husaini, dalam Defitri 2018).

Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai (Defitri, 2018).

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Widayanti (2019) dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan juga sistem pengendalian internal yang lebih baik. Pengendalian internal digunakan untuk mengantisipasi adanya pencurian,

penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam Faishol (2016) “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 dalam Faishol (2016) bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Pengendalian administratif Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Wilkinson et al., dalam Utama (2017) menyebutkan sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah 1. perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; 2. pemisahan tugas; 3. otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; 4. pemeriksaan independen atas kinerja; dan 5. penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat. Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer dalam Nurillah , 2014): a. adanya perlindungan fisik terhadap harta; b. pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; c. adanya jejak audit yang baik; dan d. sumber daya manusia yang optimal.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas PEMDA (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal PEMDA. Pihak-pihak eksternal terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), BPK, investor, kreditur dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. (Sujarweni, dalam Alamsyah 2017).

Menurut Halim dalam Mokoginta (2017) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut : “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat 1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Ratifah dan Ridwan dalam Defitri, 2018) dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan

keuangan yang berkualitas. Jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik (Roviyantie dalam Defitri, 2018).

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputersasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan (Mardiasmo dalam Artika, 2017).

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Definisi teknologi informasi menurut Sutabri dalam Shafari (2017) adalah sebagai berikut : “Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”. Menurut Kadir dalam Mamahit (2017) Teknologi Informasi (*information technology*) biasa disebut TI, IT, atau, *infotech*. teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang mampu membantu orang untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi.

Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi bisa meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri. Menurut Hamzah dalam Zubaidi (20019), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya a. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Hanafi dalam Zubaidi, 2019). Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka dari pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No.56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini dipaparkan 20 penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu pengaruh pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari 20 penelitian terdahulu adalah pada tempat, waktu penelitian dan objek penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan, menggunakan penelitian berupa regresi linier berganda dan satu variabel terikat yaitu Kualitas Laporan keuangan.

Penelitian Defitri (2018) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Mene, dkk (2018) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Mokoginta, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian Ratifah (2012) dengan judul Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian Alamsyah (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menunjukkan bahwa bahwa secara simultan kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Faishol (2016) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menunjukkan bahwa sistem pengendalian sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian ini, bahwa secara simultan atau secara bersamaan faktor atau unsur sistem pengendalian intern berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Nurilah (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Zubaidi (2019) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia dan

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Akhmad (2017) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara signifikan terhadap ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Enrekang walaupun agak kekurangan tenaga.

Penelitian Wati (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menunjukkan kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan SAP, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Kiranayanti (2016) dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Botutihe (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo

Selain itu penelitian dari Erawati (2018) dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. Menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Utama (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Haza (2015) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Megawati, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Mamahit, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan daerah.

Penelitian Artika (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Widayanti (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Penelitian Pravasanti (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.